

# MOTIVASI INDIA MENOLAK PENGHAPUSAN SUBSIDI PANGAN DOMESTIK DALAM KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO IX DI BALI

**TULUS FREDY SILABAN**  
**Pembimbing: Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si**

**Email: [Tulusfredysilaban@yahoo.com](mailto:Tulusfredysilaban@yahoo.com)**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63277, 23430

## *Abstract*

*This research describes about the motivation of India rejecting the elimination of domestic food subsidies in ninth WTO Ministerial Conference at Bali in 2013. This problem occurs when the developed countries that are members of WTO urge the elimination of domestic food subsidies at Ministerial Conference as set out in the Agreement on Agriculture (AOA) in 1995, which aims to reduce the role of government in agriculture and trade to reduce trade barriers on international trade.*

*The writer collects data from books, encyclopedia, journals, mass media and websites to analyze the motivation of India rejecting the elimination of domestic food subsidies in ninth WTO Ministerial Conference at Bali in 2013. The theories applied in this research are foreign policy theory model the decision-making from Richard Snyder and national interest from Donald E. Nuechterlein.*

*The research shows that the motivation of India rejecting the elimination of domestic food subsidies in WTO Ministerial Conference because the India goverment considers the elimination of domestic food subsidies would adversely affect the condition of agriculture in India. While at the same time the Indian goverment is trying to achieve self-sufficiency of food in India with sufficient national food stocks.*

*Keywords : Subsidies, Food, Motivation*

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai motivasi India menolak penghapusan subsidi pangan domestik dalam konferensi tingkat menteri WTO IX di Bali tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan kondisi pertanian dan pangan serta perekonomian domestik

di India yang mendorong Pemerintah India untuk mempertahankan dan meningkatkan

subsidi pangan domestiknya terhadap ketentuan yang diatur oleh WTO.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin,

laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 1995-2013 pada awal pembentukan WTO, kondisi pertanian dan pangan serta perekonomian domestik India sampai pada konferensi tingkat menteri (KTM) WTO di Bali. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan negara bangsa (*nation-state*) sebagai tingkat analisa dan unit analisa dalam penelitian ini. Tingkat analisa negara-bangsa mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi dipentas dunia. Negara merupakan aktor dalam hubungan internasional yang memiliki kepentingan nasional (*national interest*).

Untuk menjelaskan motivasi India menolak penghapusan subsidi pangan domestik pada KTM WTO IX di Bali tahun 2013, penulis meminjam teori politik luar negeri oleh Richard Snyder, yaitu model pembuatan keputusan (*the decision-making model*) yang

mengemukakan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.<sup>1</sup> Dalam fenomena ini, faktor internal adalah kondisi pertanian dan pangan di India dan faktor eksternal adalah organisasi internasional WTO.

Asumsi dasar teori ini yaitu bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.<sup>2</sup> Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks<sup>3</sup> dengan prosesur-prosedur kelembagaannya.<sup>4</sup>

Analisis-analisis dalam teori ini berhubungan dengan struktur dan proses dari pengambilan keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan tertentu,<sup>5</sup> sehingga aktivitas analisisnya berada pada pembukaan “kotak hitam (*black box*) dari perspektif analisis adaptif dan perspektif strategi. Peranan kepemimpinan,<sup>6</sup> persepsi, dan sistem

---

<sup>1</sup> Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, hal. 199-205.

<sup>2</sup> Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal.7.

<sup>3</sup> Alison Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston, Little, Brown.

<sup>4</sup> Anderson Paul A. 1987. “What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision? The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy”, in Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., and James N. Rosenau, eds., *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston, Unwin, hal. 285-308.

<sup>5</sup> John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 59.

<sup>6</sup> Margaret Hermann, “Explaining Foreign Policy: Using Personal Characteristics of Political Leaders”, *International Studies Quarterly* 24 (1), 1980, hal.7-46.

kepercayaan<sup>7</sup> dari para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.<sup>8</sup> Penelitian melalui perspektif ini juga hirau akan karakteristik situasional ketika proses pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan dibuat dalam suatu situasi tertekan, krisis, dan beresiko.<sup>9</sup>

Model ini menyatakan bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*). Kelebihan model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri itu sendiri. Maka itu faktor-faktor paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah :

- Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut).

- Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi).
- Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri.
- Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

Menurut Neuchterlein, konsep kepentingan nasional dibagi menjadi 4 poin, yang disebut sebagai kepentingan dasar suatu negara, yaitu :

1. *Defense Interest*: “*The protection in the nation state and citizen from the treat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired threat to national political system*”. Kepentingan pertahanan yaitu adanya perlindungan terhadap negara bangsa dan warga negara dari ancaman fisik kekerasan oleh negara lain atau ancaman politik dari luar negeri dari negara lain.
2. *Economic Interest*: “*Enhancement of national interest economic well-being in relation with other countries*”. Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.
3. *World Order Interest*: “*The maintance of an international politic and economy system in with us citizen and comercial can operate paecefully outside*

<sup>7</sup> Ole Holsti, “The Belief System and National Images: A Case Study”, *Journal of Conflict Resolution* 6 (3), 1962, pp.244-252; R. Jervis. 1976. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton, NJ., Princeton University Press.

<sup>8</sup> Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, eds., *Foreign Policy Decision-Making: An Analytical perspective to the Study of International Politics*, New York, The Free Press, 1962 ; Valerie M. Hudson, Derek H. Chollet, and James M. Goldgeier, *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*.

New York, Palgrave Macmillan, 2002

<sup>9</sup> James A. Robinson dan Richard C. Snyder, “Decision-Making in International Politics”, in Herbert C. Kelman, ed., *International Behaviour: A Social-Psychological Analysis*. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1965, pp.433-463; G.M., Herek, Irving L. Janis, and P. Huth, “Decision-Making During International Crises: Is Quality of Process Related to Outcome?”, *Journal of Conflict Resolution* 31 (2), 1987, pp.203-226; Jack Levy, “Prospect Theory and International Relations: Theoretical Applications and Analytical Problems”, *Political Psychology* 13 (2), 1992, pp.171-186.

*their own words*". Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemulihan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.

4. *Ideological Interest: "The protection and futherance of a set values with the citizen of a nation state and believe to be universality good"*. Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.<sup>10</sup>

Berdasarkan konsep kepentingan yang dikemukakan Neuchterlein di atas, *Economic Interest* menjadi perhatian penulis dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. India, sebagai aktor utama dalam penelitian ini, juga berada pada posisi aktor rasional, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, juga dianggap mampu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan rasional (mampu mengkalkulasikan untung-rugi) dalam memutuskan suatu keputusan, untuk mencapai kepentingan nasional dan melakukan mempertimbangan terhadap keberadaan *power* atau kekuatan yang dimiliki negara.

Penulis menggunakan perspektif merkantilis (nasionalisme ekonomi) dalam menjelaskan penelitian ini. Perspektif merkantilis dapat menjelaskan mengenai peran negara dalam memberikan subsidi. Merkantilis mengatakan bahwa negara harus memelihara kepentingan nasionalnya

dari keadaan dunia yang anarki sebab hal itu merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya. Negara seyogianya memberikan proteksi terhadap rakyatnya baik dalam bentuk pemberian subsidi atau dalam bentuk lain. Dalam ekonomi politik internasional, nasionalisme ekonomi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa negara harus menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempertahankan kelangsungan kepentingan nasional negara tersebut. Nasionalisme ekonomi juga berpandangan bahwa tujuan politik harus melindungi kebijakan ekonomi karena tujuan dari kebijakan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan kekuatan negara dalam hal mempertahankan kepentingan nasional.<sup>11</sup>

Nasionalisme ekonomi menyarankan agar negara mempergunakan seluruh aspek kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk hubungan ekonomi luar negeri adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan negara. Berdasarkan perspektif ini maka pergerakan barang-barang, sektor jasa atau pelayanan, investasi, dan hal lainnya yang mendukung perekonomian negara harus dimasukkan kedalam kepentingan nasional melalui pembatasan (*barriers*) dan dukungan dalam negeri (*domestic support*). Pembatasan dalam perdagangan banyak bentuknya, antara lain adalah tarif, ada juga non-tarif yang termasuk didalamnya adalah larangan untuk melakukan ekspor dan impor berdasarkan pada sanksi politik, kuota (pembatasan jumlah unit), pembatasan harga (*pricing limit*), pelarangan ataupun pengawasan teknikal (*technical restriction*). Semua ini dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengamankan perekonomiannya (*economic security*) dan untuk

<sup>10</sup> Nuechterlein Donald E. 1976. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2 p.248.

<sup>11</sup> Adam Smith, The Wealth of Nations, Vol. I, pp. 129 tersedia di <http://www.libertarian.co.uk/lapubs/lapam/lapam001.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2014.

meningkatkan kekuatan negaranya demi pencapaian kepentingan nasional.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

India adalah sebuah negara di Benua Asia bagian selatan yang memiliki populasi penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi yang mencapai 1,2 milyar jiwa.<sup>13</sup> Pada kondisi geografis, India memiliki banyak sungai-sungai besar seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Yamuna, Godavari dan Krishna.<sup>14</sup> Keberadaan sungai-sungai ini menjadi faktor penyebab sebagian besar lahan di India menjadi subur, hal tersebut menempatkan sektor pertanian adalah jantung kehidupan bagi India semenjak dahulu kala. Kondisi ini yang melatarbelakangi mengapa kurang lebih 800 juta jiwa penduduk India menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian.

Sebelum pertengahan 1960-an (pasca kemerdekaan) India mengandalkan impor dan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, dua tahun kekeringan yang parah yaitu pada tahun 1965 dan 1966 meyakinkan India untuk mereformasi kebijakan pertanian dan bahwa India tidak bisa bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi kebutuhan pangan negerinya.

India mengadopsi reformasi kebijakan yang difokuskan pada tujuan swasembada gandum yang merupakan bahan makanan pokok disamping beras. Hal ini menghantarkan pada Revolusi Hijau di India. Dimulai dari keputusan mengadopsi bibit unggul, varietas gandum tahan hama dan dengan pengetahuan

pertanian yang lebih baik, India berupaya meningkatkan produktivitas pertaniannya.

Lebih dari 50 tahun sejak kemerdekaannya, India telah membuat kemajuan besar menuju ketahanan pangan. Upaya yang dilakukannya ialah mendukung kebijakan makro di bidang pertanian baik dari segi infrastruktur maupun dari segi sumber daya manusianya. India sangat tergantung kepada musim karena secara geografis beberapa wilayah di India memiliki iklim yang berbeda-beda sehingga produktivitasnya pertaniannya pun berbeda-beda.

Dari segi infrastruktur, India memfokuskan pada sistem irigasi yang memerlukan modal dalam jumlah besar seperti bendungan besar, kanal panjang dan sistem irigasi skala besar lainnya yang berbasis pada investasi publik. Antara tahun 1951 dan 1990, hampir 1.350 irigasi besar dan menengah dimulai dan sekitar 850 telah diselesaikan hampir di seluruh wilayah India. Jika bukan karena keterlibatan pemerintah yang besar dalam menyimpan air untuk irigasi pertanian, maka dipastikan banyak daerah yang akan mengalami kekeringan karena pertanian di India sangat bergantung pada musim. Ketergantungan pada musim hujan ini cukup berisiko karena rata-rata curah hujan yang diterima bervariasi di setiap daerah.

Dari segi sumber daya manusianya, India mendirikan institusi dan universitas pertanian dalam jumlah yang banyak. Ada sekitar 22 institusi atau universitas khusus cakupan pertanian di India seperti Indian Agricultural Research Institute, Allahabad Agricultural Institute, National Dairy Research Institute, Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Tamilnadu Veterinary And Animal Sciences University, Orissa University of Agriculture and Technology dan lain sebagainya. Belum lagi jurusan pertanian

<sup>12</sup>

<http://homes.ieu.edu.tr/~ibagdadi/INT230/Eric%20Helleiner%20-%20Economic%20Nationalism%20as%20a%20Challenge%20to%20Economic%20Liberalism.pdf>, hal 303. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2014.

<sup>13</sup> <http://data.worldbank.org/country/india>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014

<sup>14</sup>

[https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Geography\\_of\\_India.html](https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Geography_of_India.html). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

yang ada pada universitas pada umumnya.<sup>15</sup>

Pada tahun 2010, Bank Dunia memperkirakan 400 Juta Jiwa dari 1,2 Miliar Jiwa populasi dunia yang berada pada garis kemiskinan dengan pendapatan dibawah 1 US\$ per hari hidup di India.<sup>16</sup> Pemerintah India menyadari bahwa pemberian subsidi pangan terhadap produk domestik pertanian seperti gandum, beras dan juga pupuk akan meningkatkan daya beli masyarakat India terhadap komoditi pangan yang menjadi bahan makanan kehidupan sehari-hari. Metode pemberian subsidi pangan ini adalah dengan membeli hasil pertanian dari petani lokal diatas harga pasar dan menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga lebih murah dari produk impor yang beredar di pasar.

Sehingga pada tahun 2013 pemerintah India melalui majelis tingginya mengesahkan Undang-Undang Keamanan Pangan dengan program *National Food Security Act* yang menjadikan pangan sebagai hak warga negara, dimana setiap keluarga yang masuk kategori keluarga miskin akan mendapatkan pangan berharga murah. Dalam kebijakan ini satu kilo beras akan dihargai tiga rupe atau Rp.650, gandum seharga dua rupe (Rp.330) dan millet seharga satu rupe (Rp.165). Skema ini menghabiskan anggaran senilai 1,3 triliun rupe per tahun atau setara dengan Rp.213,5 triliun.<sup>17</sup>

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri

<sup>15</sup>

<http://news.detik.com/read/2013/08/30/113726/2345087/471/2/pertanian-india-versus-indonesia>.

Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

<sup>16</sup>

<http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IND>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

<sup>17</sup> <http://www.dw.de/pangan-murah-bagi-warga-miskin-india/a-16948981>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) – Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini.<sup>18</sup>

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar GATT/WTO. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) memuat kurang lebih 145 ketentuan khusus yang dikenal dengan istilah *Special and Differential Treatment* (S&D), ketentuan yang berlaku bagi anggota-anggota WTO yang berasal dari negara-negara sedang berkembang (NSB).<sup>19</sup> Meskipun telah menjadi bagian integral dari Perjanjian WTO, secara teoretis eksistensi S&D tersebut masih mengundang kontroversi.

WTO mempunyai agenda Konferensi Tingkat Menteri (KTM) setiap jangka waktu dua tahun. Dalam KTM WTO IX yang diadakan pada tanggal 3-7 Desember di Bali, 159 negara anggota sepakat mengangkat beberapa isu yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal sebagai Paket Bali. Sebelumnya pada tahun 2001, telah diselenggarakan DDA (*Doha Development Agenda*) dengan 19 isu yang ditargetkan selesai pada tahun 2005, namun DDA mengalami kebuntuan.<sup>20</sup>

Pada penghujung tahun 2013 menjadi pertarungan bagi negara maju dan berkembang yang terhimpun dalam WTO. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO yang diadakan di Bali, Indonesia, pada bulan Desember tahun itu selain menjadi palagan pertarungan kepentingan negara-negara tersebut juga menjadi penentuan nasib keberlanjutan

<sup>18</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/1779/2/1HK08683.pdf>, hal 6. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>19</sup>

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hubunganinternasional/206613018/BAB%203.pdf>, hal 53-52.

Diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>20</sup> H. S. Kartadjoemena, "GATT dan WTO; Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1996, hal 33.

Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda/DDA*), putaran perundingan terkini WTO. perundingan WTO mengerucut menjadi tiga isu utama, yaitu: pertanian (ketahanan pangan), fasilitasi perdagangan, dan fleksibilitas bagi negara-negara paling miskin (Least Developed Countries/LDCs). Isu dalam pertanian mengerucut pada isu cadangan pangan (*public food stockholding*) dalam sebuah jangka waktu tertentu (*peace clause*, dalam hal ini 4 tahun). Masalahnya cadangan pangan dianggap WTO sebagai mendistorsi perdagangan, meskipun di lain pihak subsidi pangan di negara-negara maju tetap dibolehkan. Isu fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*) adalah isu milik negara-negara maju, yang mendesak dibangunnya fasilitas-fasilitas yang memperlancar perdagangan di negara-negara berkembang/miskin bagi lancarnya perdagangan rantai pasokan global.

Dalam sektor pertanian menjadi persoalan bagi India sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk ketiga terbesar didunia, dan juga sekitar 56 persen penduduk India sebagai petani. Terjadi korelasi dimana penduduknya yang memiliki kepadatan kemudian angka pekerja sebagian besar terserap pada pertanian sehingga menjadi pengaruh isu ketahanan pangan, sebab ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu sensitif bagi India. Isu ini juga memiliki dimensi sosial yang tinggi. Sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab negara atas rakyatnya dalam melindungi ketahanan pangan sudah menjadi konsensus nasional.

Bidang agrikultur, saat ini beberapa produk luar telah membanjiri pasar agrikultur India, sebagai contohnya adalah keju dari Swiss, apel dari Selandia Baru, coklat dari Brazil dan biskuit dari Thailand. Produk Impor yang beredar bebas di India ini adalah salah satu hasil dari kesepakatan India dengan WTO yaitu AoA (*Agreement on Agriculture*) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar untuk makanan asing. Hal ini jelas merugikan masyarakat India, karena

produk-produk dari dunia barat memiliki keunggulan dari harga maupun kualitas. Terlihat lebih tingginya subsidi dan teknologi yang diterapkan negara barat terhadap agrikultur mereka, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih baik dan dapat menjadi lebih murah, sedangkan India tidak memberikan subsidi sebesar negara barat dan para petani masih menggunakan teknik tradisional<sup>21</sup>.

Masalah ini tentu merupakan masalah besar bagi India, dan sektor Agrikultur adalah sektor terbesar bagi ekonomi India. Sektor ini telah mempekerjakan 52 persen dari total angkatan kerja India, sehingga kesulitan para petani tersebut merupakan kesulitan sebagian besar keluarga di India. Kesulitan yang dihadapi oleh petani India ini sangat digambarkan oleh tingkat bunuh diri petani yang sangat tinggi di India, tercatat sekitar 200 ribu petani India bunuh diri sejak tahun 1997<sup>22</sup> Disisi lain produk ekspor India tidak mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari sistem perdagangan bebas ini. India Pada tahun 2010, India melakukan Impor barang sebesar 322,702 juta US\$ dan jasa sebesar 116,906 juta US\$, sedangkan ekspor barang sebesar 216,162 juta US\$ dan jasa sebesar 109,514 juta US\$.<sup>23</sup> Angka ini menggambarkan bahwa India kurang mampu membanjiri pasar dunia, di sisi lain pasar lokal mereka di ekspansi oleh negara lain. Dalam bidang ekspor, produk mereka yang masih kalah saing dengan produk-produk dunia barat. Sebagai salah satu contoh adalah Indian Oil Corporation yang bergerak di bidang gas dan minyak bumi, dan merupakan perusahaan terbesar di India, saat ini memiliki pemasukan sebesar 68.83 Miliar

---

<sup>21</sup> Third World Network., Flood of Food Imports Could Destroy Indian Agriculture(online), (<http://www.twinside.org.sg/title/flood-cn.htm>), Diakses 11 September 2014.

<sup>22</sup>BBC News., (<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india16281063>), diakses 11 September 2014

<sup>23</sup>The Federation of International Trade Associations., (<http://fita.org/countries/india.html>), diakses 12 September 2014.

US\$.<sup>24</sup> Masih kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Exxon Mobil yang memiliki pemasukan 486.429 Miliar US\$.<sup>25</sup> Bahkan perusahaan ini disulitkan dengan banyaknya perusahaan minyak lain yang masuk ke India.

Ketimpangan yang muncul ialah mengenai subsidi itu sendiri. Dimana negara maju justru member kucuran subsidi kepada sektor pertanian, negara maju seperti Amerika Serikat selama ini menggelontorkan subsidi pertanian tak kurang dari 100 miliar per tahun. Sementara negara di Eropa mengucurkan subsidi sedikitnya 80 miliar Euro tiap tahun. Artinya fakta tersebut justru menjungkir balikkan atas realitas dimana negara maju justru menjauh atas jebakan rezim pasar bebas dan mengamankan negaranya, padahal negara berkembang utamanya India dibayangi ketakutan oleh tiadanya subsidi yang boleh diberikan oleh pemerintah sehingga taruhannya adalah menimbulkan frustrasi sosial yang turut membingkai hadirnya kehancuran bagi bangsa tersebut. sikap pesimistis sangat dimungkinkan oleh negara berkembang, penulis menganggap dalam sitem dan aturan WTO tersebut dianggap timpang, dilandaskan oleh negara maju, selanjutnya aturan atas regulasi pertanian dalam *Bali Package* justru lebih menguntungkan korporasi global (MNC).

Dalam perdebatannya antara Amerika di Sidang WTO di Bali, mungkin sah-sah saja pihaknya mendukung penghapusan subsidi bagi setiap negara namun bagi posisi India sungguh berbeda jauh dengan Amerika, katakanlah masalah aktual mengenai kemiskinan, peningkatan pendapatan memang terjadi akan tetapi

tidak terlalu signifikan untuk mengatasi kemiskinan, malah faktanya semakin meningkat. Sebanyak 28 persen penduduk negara itu hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 37,2 persen pada tahun 2010, dan 75.6 persen masyarakat hidup dengan pendapatan dibawah 2 dollar Perhari<sup>26</sup>. Selanjutnya membuktikan bahwa perdagangan bebas tampak memberikan keuntungan yang sangat kecil dan tidak bisa mensejahterakan masyarakat India, sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip perdagangan bebas WTO seperti yang telah tidak mampu menciptakan kesetaraan ekonomi dan stabilitas bagi India.

Pada kenyataannya ketimpangan kompetisi dengan produk-produk yang diimpor dari barat yang dinilai lebih unggul dan berkualitas, karena barang-barang India di produksi dengan teknologi yang cenderung sederhana dibanding barang produksi negara kompetitornya seperti Amerika Serikat utamanya yaitu sektor pertanian. Sektor ini terkena dampak paling besar dari adanya kebijakan perdagangan bebas. India tidak memberikan subsidi sebesar negara maju dan para petani masih menggunakan teknik tradisional.<sup>27</sup> Jadi walaupun Indiamemiliki teknologi informasi dan telekomunikasi yang sudah canggih namun dalam teknologi produksi terutama dalam sektor pertanian India masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara barat dalam hal ini Amerika Serikat. Hal ini menjadi suatu ketimpangan yang sangat jelas. Ketimpangan lain terjadi dalam sektor ekspor-impor. India menerima jumlah impor yang sangat banyak namun tidak bisa mengimbangi jumlah ekspor

<sup>24</sup>CNNMoney., (<http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/snapshots/6361.html>), diakses pada 12 September 2014

<sup>25</sup>United State Exchange and Security Commissio., (<http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312511050134/d10ka.htm>) diakses pada 13 September 2013

<sup>26</sup>United Nations Development Programme, *Human Development Indices*(online), ([http://hdr.undp.org/en/media/HDI\\_2008\\_EN\\_Table.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Table.pdf)), diakses 13 September 2014

<sup>27</sup>Third World Network, *Flood of Food Imports Could Destroy Indian Agriculture*(online), (<http://www.twinside.org.sg/title/flood-cn.htm>), diakses 11 September 2014

yang juga semestinya harus tinggi. Bahkan dalam enam tahun kebelakang, petani India banyak mengalami kerugian serta frustasidan lebih dari tiga ribu petani bunuh diri di Andhra Pradesh. Penyebab potensial yang menyebabkan hal ekstrim ini terjadi adalah eksploitasi oleh perusahaan agri bisnis multinasional dan kesenjangan ekonomi yang parah.<sup>28</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa motivasi India menolak penghapusan subsidi pangan domestik dalam KTM WTO IX di Bali tahun 2013 adalah karena belum tercapainya ketahanan pangan di India yang membuat ketidaktersediaan stok pangan yang mencukupi untuk masyarakat atau populasi di India yang mencapai 1,2 miliar jiwa.

Swasembada pangan adalah salah satu element penting untuk mencapai ketahanan pangan kemampuan suatu negara untuk memberikan atau mencukupi kebutuhan pangan setiap rumah tangga di negaranya baik itu dengan memberikannya secara gratis/diskon atau dengan menyediakannya di pasar untuk dibeli oleh masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah India ingin berfokus terhadap pengembangan sektor pertanian yang memproduksi pangan. Maka dari itu ketahanan pangan menjadi kepentingan nasional India dalam melakukan interaksi dengan negara lainnya atau organisasi regional maupun Internasional seperti WTO.

Kemiskinan dan kelaparan di India menjadi perhatian Pemerintah India, hal tersebut terlihat bahwa Rancangan Undang-Undang Keamanan Pangan pada tahun 2013 telah disetujui dan melahirkan program *National Food Security Act* yang diharapkan masyarakat India dapat

mengakses pangan baik yang di produksi maupun diimpor untuk kebutuhan sehari-hari.

WTO mempunya tujuan untuk memajukan tingkat kehidupan masyarakat internasional dengan cara meningkatkan kerjasama setiap negara pada sektor perdagangan, akan tetapi aturan-aturan dalam WTO untuk mencapai tujuan tersebut belum bisa diimplementasikan terhadap negara semua negara, terlebih terhadap negara berkembang dan negara kurang berkembang. Karena ketidaksiapan negara-negara tersebut untuk menghadapi persaingan bebas dengan negara maju yang lebih unggul dalam sektor ekonomi yang menopang produksi nasional dan teknologi yang lebih canggih untuk menciptakan produk yang lebih efisien dan higienis..

Ketentuan yang dimuat dalam prinsip dasar WTO, yaitu : prinsip (1) perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota (MFN) dan prinsip (5) perlakuan khusus terhadap negara berkembang (S&D) menjadi penghambat tercapainya konsensus dalam setiap konferensi WTO. Negara maju menginginkan WTO konsekuen dengan prinsip dasar WTO yang memperlakukan semua negara anggota sama. Begitu juga sebaliknya negara berkembang menginginkan dalam setiap kesempatan dan perjanjian kerjasama harus diuntungkan dan mendapat perlakuan khusus sesuai dengan yang menjadi prinsip dasar WTO.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbot, Roderick. 2007. "The World Trade Organization". Burlington: Ashgate publishing company.
- Bandoro, Bantarto. 1992. *Masalah keamanan internasional, Model center periphery*. Jakarta. CSIS.

---

<sup>28</sup>"WTO Kills Farmers": India Free Market Reforms Trigger Farmers' Suicides, (<http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6522>), diakses 14 September 2014

Breuning, Marijke (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.

Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Doni J. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka.

Jemadu Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.

### **Jurnal**

Anderson Paul A. 1987. "What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision? The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy", in Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., and James N. Rosenau, eds., *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston, Unwin.

Ford, Jane. 2002. "A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO", *International Studies Review*, Vol. 4, No. 3, USA: Blackwell Publishing.

James A. Robinson dan Richard C. Snyder, "Decision-Making in International Politics", in Herbert C. Kelman, ed., *International Behaviour: A Social-Psychological Analysis*. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1965, pp.433-463; G.M., Herek, Irving L. Janis, and P. Huth, "Decision-Making During International Crises: Is Quality of Process Related to Outcome?", *Journal of Conflict Resolution* 31 (2), 1987, pp.203-226; Jack Levy, "Prospect Theory and International Relations: Theoretical Applications and

Analytical Problems", *Political Psychology* 13 (2), 1992, pp.171-186.

Margaret Hermann, "Explaining Foreign Policy: Using Personal Characteristics of Political Leaders", *International Studies Quarterly* 24 (1), 1980.

Ole Holsti, "The Belief System and National Images: A Case Study", *Journal of Conflict Resolution* 6 (3), 1962, pp.244-252; R. Jervis. 1976. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton, NJ., Princeton University Press.

Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, eds., *Foreign Policy Decision-Making: An Analytical perspective to the Study of International Politics*, New York, The Free Press, 1962 ; Valerie M. Hudson, Derek H. Chollet, and James M. Goldgeier, *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*. New York, Palgrave Macmillan, 2002.

Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.

### **MEDIA INTERNET**

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-dan-paket-bali-id0-1387252576.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

<http://www.antaraneews.com> pada kasus penolakan India terhadap kebijakan paket Bali yang terjadi pada 5 Desember 2013. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/12/07/mxfk6i->

ktm-wto-hasilkan-paket-bali-negara-berkembang-diberi-fasilitas. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

[http://indonetasia.com/definisionline/?tag=mengenai definisionline perdamaian](http://indonetasia.com/definisionline/?tag=mengenai+definisionline+perdamaian). Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

[https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Geography\\_of\\_India.html](https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Geography_of_India.html). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

<http://data.worldbank.org/country/india>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.

<http://news.detik.com/read/2013/08/30/113726/2345087/471/2/pertanian-india-versus-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

<http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IND>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

<http://www.dw.de/pangan-murah-bagi-warga-miskin-india/a-16948981>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1779/2/1HK08683.pdf>, hal 6. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

[http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hubunganinternasional/206613018/BA B%203.pdf](http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/4s1hubunganinternasional/206613018/BA%20B%203.pdf), hal 53-52. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

[http://www.indiansugar.com/PDFS/EXPORT\\_OF\\_AGRICULTURAL\\_PRODUCTS-657.pdf](http://www.indiansugar.com/PDFS/EXPORT_OF_AGRICULTURAL_PRODUCTS-657.pdf) Diakses pada tanggal 12 Desember 2014.

<http://www.tempo.co/read/kolom/2013/12/12/966/Paket-Bali-Kemenangan-Negara-Berkembang>. Diakses pada 13 Oktober 2014.